

## KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi Jakarta 12950

# TANDA TERIMA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : MUJIBURRAHMAN

NIK : 5271041107690001

Lembaga : PEMERINTAH KOTA MATARAM

Unit Kerja : WAKIL PIMPINAN

Sub Unit Kerja : WAKIL KEPALA LEMBAGA

Jabatan : WAKIL WALIKOTA

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 1 Februari 2023

#### Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.





## PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG

: EKSEKUTIF

LEMBAGA

: PEMERINTAH KOTA MATARAM

**UNIT KERJA** 

: WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama

: MUJIBURRAHMAN

2. Jabatan

: WAKIL WALIKOTA

NHK

: 48535

#### II. DATA HARTA

٨	TANIALI	DANI	DANIC	
Α.	TANAH	DAN	DANG	IUNAN

Rp. 2.675.000.000

 Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , WARISAN Rp. 1.500.000.000

- Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
- Tanah Seluas 95 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
- Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

### B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

215.000.000

- MOBIL, MITSUBISHI XPANDER 1.5L EXCEED Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
- MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	210.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	596.529.868
F. HARTA LAINNYA	Rp.	
Sub Total	Rp.	3.696.529.868
III. HUTANG	Rp.	-
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.696.529.868

### Catatan:

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan







dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.